BAB II

PERKEMBANGAN ASEAN DARI AWAL PEMBENTUKAN HINGGA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana dinamika yang terjadi diantara negara-negara Asia Tenggara mulai dari sejarah secara umum bangsa-bangsa di kawasan ini, bagaimana mereka menjalin kerjasama awal dalam bidang politik dan membentuk sebuah organisasi, hingga pada akhirnya memutuskan untuk membentuk kawasan ini sebagai kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, politik dan budaya melalui ASEAN *Economic Community* 2015. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sebelumnya bangsa-bangsa Asia Tenggara sudah memiliki riwayat kerjasama yang terjalin baik atau sebaliknya justru lebih banyak mengalami konfrontasi.

A. Sejarah singkat Politik kawasan Asia Tenggara

Kawasan Asia tenggara terdiri dari negara-negara yang heterogen. Dilihat dari segi ekonomi terdapat kesenjangan yang cukup terlihat jelas dengan adanya negara maju seperti Singapura, negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara tertinggal seperti Myanmar dan Kamboja. Perbedaan bahasa negara-negara di Asia Tenggara yang disebabkan banyaknya etnis yang berada di kawasan ini menambah keberagaman tersebut. Satu hal yang menjadi persamaan adalah persamaan sejarah dimana semua negara Asia Tenggara kecuali Thailand, pernah mengalami masa kolonialisme. Bangsa eropa dengan semangat 3G (*Gold*,

Glory, Gospel) yaitu semangat untuk meraih kekayaan, kejayaan dan menyebarkan ilmu pengetahuan ke kawasan yang dianggap masih terbelakang, melakukan ekspansi ke negara-negara di benua Afrika dan Asia. Sejarah mencatat, beberapa negara eropa pernah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah jajahannya. Indonesia pernah dijajah Jepang dan Belanda. Malaysia dan Singapura (dulu masuk ke dalam wilayah federasi Malaysia sebelum akhirnya menyatakan menjadi negara merdeka pada tahun 1965), Brunei, dan Myanmar menjadi jajahan Inggris. Vietnam, Cambodia (Burma), Lao PDR adalah negara jajahan Prancis. Kemudian Spanyol yang pernah menguasai Filipina.

Sejarah panjang negara-negara Asia Tenggara tidak terlepas dari konflik. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, kebijakan luar negeri Indonesia bersifat *high profile* yang dipengaruhi determinan personal Soekarno pada saat itu (pengalaman dijajah) menjadikan politik luar negeri Indonesia begitu agresif dan cenderung konfrontatif. Politik konfrontasi Indonesia tergambar dalam semboyan Soekarno 'Inggris kita linggis, Amerika kita Setrika konfrontasi juga dilakukan Indonesia terhadap negara tetangganya, Malaysia yang dinyatakan Soekarno dengan slogan 'Ganyang Malaysia'. Malaysia juga mengalami konflik dengan negara tetangganya yang dilatarbelakangi oleh keinginan Malaysia untuk membentuk sebuah negara dengan sistem federasi yang menggabungkan Brunei, Sabah, dan Serawak dalam Persekutuan Wilayah Melayu pada tahun 1961. Indonesia menganggap pembentukan federasi Malaysia hanya sebagai 'boneka' Inggris yang menggambarkan suatu bentuk neokolonialisme. [14] Konflik juga terjadi antara Malaysia dengan Singapura yang akhirnya keluar dari federasi Malaysia dan menyatakan kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965. Sikap

---

[14]Zainudin Djafar, Moon Young Ju, Anissa Farha Mariana, *Peran Strategis Indonesia dalam Pembentukan ASEAN dan Dinamikanya*, Jakarta, UI Press, 2012, hal.49

Filipina yang mengklaim wilayah Sabah berdasarkan sejarah Sabah yang menjadi bagian dari kesultanan Sulu juga menambah konflik Malaysia. Berbeda dengan negara-negara ASEAN kepulauan yang mengalami masalah *dispute border*, konflik yang terjadi di negara-negara Indochina lebih dilatarbelakangi oleh konflik ideologi dimana ideologi komunis mendominasi wilayah tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi politik Asia Tenggara penuh dengan konflik. Dilatarbelakangi banyaknya konflik tersebut, beberapa negara Asia Tenggara melakukan kerjasama. Kerjasama awal yang muncul diawali dengan pembentukan SEATO (*Southeast Asian Nation)*. SEATO merupakan sebuah Pakta Pertahanan yang berdiri atas prakarsa Amerika Serikat. Menggandeng negara Asia Tenggara, Filipina dan Thailand, organisasi ini bertujuan untuk membendung arus komunis di Asia Tenggara, karena seperti yang diyakini banyak pihak bahwa komunisme akan mengakibatkan efek domino, yaitu apabila satu negara sudah terpengaruh ideologi ini maka negara-negara di sekitarnya akan mudah jatuh ke dalam pengaruh komunis juga. Akan tetapi usaha pembendungan komunis ini mengalami kegagalan karena arus persebaran ideologi, dalam hal ini adalah ideologi komunis, tidak dapat dicegah dengan cara-cara kerjasama militer konvensional. Kegagalan SEATO juga disebabkan tidak didapatkannya dukungan dari negara-negara Asia Tenggara yang lain, hal ini terbukti dengan hanya Filipina dan Thailand saja yang menjadi anggota pakta pertahanan ini. Akhirnya SEATO dibubarkan pada tahun 1975 menyusul kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam.

Sebelum SEATO mengalami kegagalan hingga pada akhirnya dibubarkan, pada tahun 1961 muncul sebuah kerjasama antar negara Asia Tenggara, tepatnya pada tanggal 31 Juli, Malaysia mengusulkan untuk membangun kerjasama antar negara Asia Tenggara dengan membentuk ASA *(Association of Southeast Asia)*. Kerjasama yang dimaksud meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang tujuannya

tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Meskipun dinamakan *Association of Southeast Asia*, sebenarnya anggota perkumpulan ini hanya terdiri Malaysia sebagai penggagas, Thailand dan Filipina sedangkan negara Asia Tenggara lainnya tidak bergabung dikarenakan negara-negara Indochina masih mengalami konflik sedangkan Indonesia memutuskan untuk tidak menjadi bagian ASA karena menganggap perkumpulan ini hanya sebagai terusan dari SEATO. Dengan mengusung kesejahteraan negara sebagai tujuannya, namun pada akhirnya kerjasama ini mengalami kegagalan disebabkan terjadinya friksi antar anggotanya yaitu Malaysia-Filipina atas wilayah Sabah.

Selanjutnya untuk mengatasi friksi antara Malaysia dan Filipina, pada tahun 1963, bersama Indonesia mereka membentuk kerjasama yang dikenal dengan Maphilindo. Dasar pembentukan Maphilindo adalah kesamaan kultur, oleh karena itu meskipun kerjasama yang dijalin sama dengan yang dilakukan ASA, akan tetapi Thailand yang sebelumnya tergabung dalam ASA memilih untuk tidak bergabung karena merasa terdiskriminasi. Maphilindo tidak dapat bertahan lama karena konflik Malaysia-Filipina semakin memuncak dan Maphilindo akhirnya bubar.

Seiring berkembangnya situasi politik internasional, kondisi politik Asia Tenggara telah mengalami perubahan. Kondisi politik yang semula didominasi oleh konflik dan konfrontasi perlahan-perlahan ditinggalkan. Konflik yang sempat melingkupi kawasan ini perlahan mulai menemui pemecahan masalahnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara percaya bahwa kerjasama akan menghasilkan hubungan yang lebih baik daripada memilih jalan perang terbuka. Telah nampak dari ketiga kerjasama yang pernah ada di kawasan ini, yaitu kecenderungan melakukan politik akomodatif daripada konfrontatif meskipun kerjasama-kerjasama tersebut gagal, tetapi hal tersebut merupakan sebuah tonggak awal bagi lahirnya kerjasama yang lebih solid antar negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN.

ASEAN resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Berdirinya ASEAN adalah hasil kolaborasi 5 negara (Indonesia,Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura) yang mempunyai cita-cita luhur untuk membangun kerjasama yang mendukung terciptanya stabilitas keamanan regional, peningkatan ekonomi, sosial dan budaya. Berbeda dengan kerjasama regional yang pernah gagal di kawasan ini, pembentukan ASEAN didasari dengan *Confidence Building Measure* (CBM) atau membangun rasa saling percaya antar anggota. Sebagai kawasan yang heterogen dari berbagai sisi, membangun rasa saling percaya merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Melalui CBM negara-negara Asia Tenggara akan dipaksa untuk mengesampingkan kecurigaannya dengan negara anggota yang lainnya, misalnya kecurigaan akan tindakan ekspansi yang dilakukan negara tetangganya. Selain itu perasaan sebagai bangsa yang memiliki identitas tunggal yaitu bangsa Asia Tenggara harus diutamakan sehingga menciptakan iklim yang aman dalam menjalankan kebijakan politik maupun untuk menjalin kerjasama.

Tindak lanjut dari pembentukan ASEAN adalah dengan menjalin kerjasama di bidang politik yang dihasilkan dari pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1971. Kerjasama ini dikenal dengan ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) declaration. Kerjasama ini secara resmi baru dijalankan pada 24 Februari 1976 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang menghasilkan *Bali Concord I*. Tujuannya adalah agar ASEAN menjadi wilayah yang aman, netral dan bebas dari intervensi dari negara di luar kawasan.

Keberhasilan ASEAN mulai terlihat pasca mengalami penambahan keanggotaan. Diawali Brunei yang bergabung pada 7 Januari 1984. Pada 28 Juli 1995 giliran Vietnam yang bergabung pasca runtuhnya tembok berlin sebagai penanda berakhirnya perang dingin. Berakhirnya perang dingin, berakhir pula arus bantuan ekonomi yang diberikan Uni Soviet

ke Vietnam. Akibatnya perekonomian Vietnam mengalami kemerosotan. Keputusan untuk bergabung dengan ASEAN ini diharapkan dapat memberikan perkembangan yang berarti bagi Vietnam. Menjadi anggota ASEAN juga merupakan sebuah pengalaman berharga bagi Vietnam karena Vietnam dengan ideologinya, bersama negara anggota lain akan belajar bekerjasama, bermusyawarah dan bermufakat. Bagi ASEAN, keanggotaan Vietnam menambah keberagaman dari organisasi ini sendiri. Menyusul Myanmar, Kamboja dan Laos bergabung secara bersamaan pada 23 Juli 1997 setelah terlepas dari konflik di negaranya.

B. ASEAN Economic Community 2015

Pasca perang dingin, hubungan internasional memasuki periode baru yaitu era globalisasi. Globalisasi membuat dunia seakan-akan tidak memiliki batas satu sama lain *(borderless)* yang dipicu oleh integrasi yang terjadi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintahan dari berbagai dunia. Integrasi tersebut adalah hasil dari proses investasi dan perdagangan dunia dimana dikuasai oleh korporasi dan ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.[15] Perdagangan menjadi penanda utama di era ini, sekaligus menghapus, meskipun tidak sepenuhnya, dominasi kerjasama-kerjasama militer yang pernah ada sebelumnya. Kondisi ini disambut baik di kawasan Asia Tenggara dengan tercetusnya membentuk suatu komunitas ASEAN. Gagasan ini muncul di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang kemudian dikenal dengan ASEAN *Vision 2020.* Angka 2020 adalah sama dengan batas akhir dari transisi menuju globalisasi ekonomi yang saat itu ditandai oleh kebebasan arus barang, jasa, dan orang pada skala dunia. Pada saat itu, masyarakat di ASEAN diharapkan bisa saling membantu dan menyatu menghadapi persaingan global yang diduga akan

[15] Adde M Wirasenjaya, ”Powerpoint Bahan Kuliah Kajian Globalisasi”, (2016)

sangat dahsyat dampaknya.[16] Usulan untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah komunitas juga diajukan Singapura pada KTT ke-8 ASEAN tahun 2002 di Kamboja. Sebagai respon atas gagasan ASEAN *Vision 2020* dan juga usulan Singapura, maka pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-9, 7 Oktober 2003, di Bali menghasilkan kesepakatan Bali *Concord II* tentang pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial-budaya.

Pertemuan-pertemuan ASEAN selanjutnya bertujuan untuk menyusun rencana agar pembentukan komunitas ASEAN nantinya dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak seperti yang dicita-citakan. KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada November 2004 telah menghasilkan sebuah kesepakatan *Program of Action* (PoA) untuk pilar keamanan dan pilar sosial-budaya. Program ini merupakan pedoman ASEAN untuk jangka pendek dan menengah (2004-2010), yang terfokus pada upaya untuk memperdalam integrasi regional dan mempersempit kesenjangan di dalam ASEAN. Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 12-13 Januari 2007 telah dicapai suatu keputusan penting, yakni kesepakatan mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Para pemimpin ASEAN bersepakat untuk memiliki komiten menciptakan *One Caring and One Sharing Community* pada 2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala Lumpur pada 1997, dan melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN memiliki "Rasa Kekitaan" (*We Feeling*). Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerja sama, solidaritas, bersama melawan kemiskinan, dan menikmati rasa aman, termasuk keamanan manusia (*human security*).[17]

---

[16] CPF Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, dkk. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal.5

[17] CPF Luhulima. Ibid hal.6

Melalui kesepakatan Bali *Concord II*, ASEAN memasuki babak baru dalam kehidupan kerjasama organisasinya. Ide untuk menjadikan ASEAN sebagai suatu wilayah yang terintegrasi adalah untuk menjadikan wilayah ini agar mampu untuk berdaya dan bersaing dengan kekuatan ekonomi asia yang sedang mengalami pertumbuhan, yaitu China dan India. Pembentukan *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagaimana yang disepakati dalam Bali *Concord II*, terdiri dari tiga pilar utama, yaitu *ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Socio-cultural Community.* Menariknya, meskipun terdiri tiga pilar utama, ASEAN menamai kerjasama ini dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini menunjukkan seolah-olah ASEAN ingin lebih terfokus pada kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Dapat dipahami memang ketiga pilar yang dicanangkan untuk membentuk sebuah kerjasama regional seperti yang dimaksud dalam Bali *Concord II*, adalah saling berkaitan satu sama lain. Stabilitas keamanan kawasan menjadi elemen penting agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Wilayah yang stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi-investasi yang ditanamkan para pemodal asing. Walaupun dinamakan *ASEAN Security Community*, ASEAN tidak menerapkan kerjasama militer ataupun menjadikan ASEAN sebagai sebuah pakta pertahanan Asia Tenggara. Keamanan yang dimaksud disini adalah menghormati kedaulatan wilayah negara anggota (*non-interferrence*) mengutamakan penyelesaian konflik antar anggota dengan cara-cara damai (*Treaty of Amity and Cooperation*-TAC), menjadi wilayah yang bebas dari nuklir (*Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone*-SEANFWZ), artinya negara-negara ASEAN dilarang memiliki, mengembangkan, mengujicoba ataupun menyediakan tempat bagi negara yang mengujicobakan senjata nuklirnya. Begitu juga dengan pilar ketiga, *ASEAN Socio-cultural Community*, dimana kerjasama dalam bidang sosial budaya ini hasil akhirnya diharapkan menghasilkan

SDM yang berkualitas yang memiliki daya saing tinggi untuk menopang dan memajukan ekonomi Asia Tenggara.

ASEAN menyadari bahwa kerjasama ekonomi akan memberikan kemakmuran dan wilayah yang makmur akan menghindarkan dari pecahnya peperangan. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembengkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementaion scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN *Industrial Projects Plan* (1967), *Preferential Trading Arrangement* (1977), ASEAN *Industrial Complementaion Scheme* (1981), ASEAN *Industrial Joint-Ventures Scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.[18]

---

[18] Kementrian Luar Negeri Indonesia. Kerjasama Ekonomi ASEAN [internet]. [diakses pada tanggal 31 Maret 2017]. Dari: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja2cCD5f_SAhVIQ48KHcDdApIQFggkMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kemlu.go.id%2FDocuments%2FKerjasama%2520Ekonomi%2520ASEAN.doc&usg=AFQjCNEWSLHRCzhfY_aaBcoQB-IPK3gP4g&sig2=JSidmg_yqxL63CPK0hMb6A&bvm=bv.151325232,d.c2I

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 AFTA *Council* pada tanggal 23 Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai implementasi *Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barriers* (NTBs) serta dalam melakukan revisi mengenai implementasi CEPT AFTA *Rules of Origin*, yang diharapkan akan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangan kawasan.[19]

Pengalaman dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ekonomi antar anggota membuat ASEAN meningkatkan kerjasama ke arah yang lebih terintegrasi dengan mencetuskan ide untuk membuat sebuah komunitas ekonomi. Sebagai langkah awal dalam proses mencapai komunitas ekonomi, ASEAN menerapkan rekomendasi dari *High Level Task Force* (HLTF) *on ASEAN Economic Integration*. HLTF ini dibentuk oleh ASEAN *Economic Ministers* yang kemudian ditugaskan membuat suatu rekomendasi atas langkah-langkah memperdalam integrasi regional. Rekomendasi tersebut diajukan bersamaan dengan disepakatinya *Bali Concord II.* Fokus dari rekomendasi HLTF adalah liberalisasi perdagangan dan jasa, serta kemudahan investasi. Di samping itu, HLTF juga mengusulkan perlunya memperkuat kerjasama dan integrasi di bidang lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia, pengakuan kualifikasi pendidikan lintas negara anggota, konsultasi kebijakan

[19]Kementrian Luar Negeri Indonesia. Ibid

keuangan dan ekonomi makro, peningkatan jaringan infrastruktur dan komunikasi, pengembangan transaksi melalui e-ASEAN, serta mengintegrasikan industri di seluruh kawasan dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta.[20]

Dengan demikian kita telah mengetahui bahwa ASEAN memiliki kecenderungan positif menjadi wadah bagi anggotanya untuk melakukan kerjasama dalam bidang politik maupun ekonomi. Hal ini yang membuat ASEAN untuk lebih menuju tahap kerjasama berikutnya yaitu membuat kawasan yang terintegrasi secara menyeluruh.

[20] CPF Luhulima Op.Cit hal 126